



Berita 1

Antisipasi Korupsi, Gapensi Jabar Gandeng Sejumlah Lembaga

JABARTODAY.COM – BANDUNG — Berdasarkan hasil pelaporan Survey Persepsi Korupsi 2015 terbitan Trabsoarency International Indonesia, tuturnya rata-rata alokasi korupsi pada sektor konstruksi sebesar 9,1 persen. Selama periode Januari-Oktober 2016, Kejaksaan Tinggi Jabar menangani ratusan kasus dugaan korupsi konstruksi. Sebanyak 59 kasus tahap penyelidikan, 33 kasus dalam fase penyidikan, dan 76 kasus masuk proses penuntutan.

Melihat kondisi itu, jajaran DPD Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) melakukan berbagai upaya pencegahan dan antisipasi. “Sejak 3 tahun lalu, kami menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, sebagai upaya pencegahan terhadap seluruh anggota agar tidak terjerumus kasus korupsi. Mulai pihak kejaksaan, kepolisian, BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan), dan berbagai lembaga lainnya,” tandas Ketua Umum Gapensi Jabar, Susilo Wibowo, pada Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Jabar, di Sekretariat Badan Pengurus Daerah (BPD) Gapensi Jabar, Selasa (15/11).

Susilo tidak membantah bahwa sejauh ini, ada oknum-oknum kontraktor yang nakal. Dia berpendapat, mayoritas dugaan korupsi pada sektor jasa konstruksi karena kekurangpahaman pengusaha tentang prosedur. Karena itulah, cetus dia, perlu adanya penambahan pengetahuan pencegahan.

Pihaknya pun, tambah Susilo, bersepakat dengan Gubernur Jabar, sebagai upaya menjadikan Jabar kembali menjadi yang terbaik di tanah air Indonesia dalam hal konstruksinya. Diungkapkan, Jabar pernah meraih predikat terbaik nasional selama 3 tahun berturut-turut.

Wakil Ketua DPD Gapensi Jabar Bidang Hukum dan Advokasi, Asep Chandra, menimpali, tahun ini pihaknya belum menerima pelaporan anggota Gapensi Jabar, yang meminta bantuan hukum karena terlibat korupsi. “Saya kira, kerjasama-kerjasama yang terjalin selama ini mulai berbuah hasil positif,” tutup Asep. **(win)**

Berita 2

Konstruksi Rawan Korupsi Gapensi Jawa Barat Tingkatkan Antisipasi

BANDUNG, (PR).- Konstruksi menjadi sektor usaha yang paling rentan akan praktik korupsi dibandingkan dengan sektor usaha lain di Indonesia. Berdasarkan Laporan Survei Persepsi

Korupsi 2015 yang diterbitkan Transparency International Indonesia, persentase korupsi di sektor konstruksi mencapai 9,1%

Demikian diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Jawa Barat (Jabar), setia untung arimuladi, pada rapat pimpinan daerah (Rapimda) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Jabar di Bandung, Selasa (15/11/2016). Kegiatan tersebut diikuti oleh 27 Badan Pengurus cabang (BPC) Gapensi Kota/Kabupaten se-Jabar, tokoh-tokoh pengusaha nasional dan Jabar, serta pejabat terkait.

“Peyimpangan yang paling sering ditemukan adalah kolusi antara oknum Pelaku usaha dan oknum pemerintah, kelalaian pelaku usaha, kecurangan pelaku usaha, dan berbagai upaya penyuapan dalam tahapan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah” katanya.

Menurut dia, pada Januari-Oktober 2016 ada 59 kasus korupsi sektor usaha properti yang masih dalam tahap penyelidikan. Sebanyak 33 kasus dalam tahap penyidikan dan 76 kasus sudah masuk proses penuntutan

Dari jumlah kasus yang ditangani tersebut, Kajati menyelamatkan uang negara lebih dari Rp 47,63 miliar. Sementara itu, uang perkara tindak pidana korupsi yang berhasil dikembalikan ke kas negara lebih dari Rp 121,59 miliar.

“Selain upaya penegakan hukum, upaya lain untuk menurunkan angka korupsi adalah dengan cara pencegahan. Hari ini kami mendatangi kerja sama dengan Gapensi Jabar dalam hal pencegahan. Mudah mudahan kedepan diikuti oleh semua DPC Gapensi di Jabar dengan melakukan kerja sama dengan kejaksaan negeri di daerah masing-masing,” katanya.

Pencegahan

Sementara itu, Wakil Ketua Gapensi Jabar di bidang Hukum dan Advokasi, Asep Chandra mengatakan tahun ini pihaknya belum mendapat laporan adanya anggota Gapensi Jabar yang meminta bantuan hukum dari organisasi karena terlibat Korupsi yang sudah dilakukan Gapensi Jabar sejak beberapa waktu lalu mulai membuahkan hasil.

Ketua umum Gapensi Jabar. Susilo Wibowo mengatakan, sejak tiga tahun lalu pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, untuk mencegah anggotanya terjerumus dalam kasus korupsi. Kerja sama tersebut di antaranya dilakukan dengan pihak kejaksaan, kepolisian, BPKP LKPP, dan berbagai lembaga lainnya.

“Memang ada oknum-oknum kontraktor yang nakal, tapi sebagian besar kasus korupsi disebabkan kekurangpahaman pengusaha mengenai prosedur yang harus ditempuh. Karena itulah diperlukan tambahan pengetahuan pencegahan dari berbagai pihak terkait,” tuturnya.

Berbagai kerja sama itu pula, menurut dia, yang kemudian menjadikan salah satu nilai unggul Gapensi Jabar. Ditambah dengan penilaian kinerja tata kelola organisasi, keuangan dan pelayanan organisasi, tahun ini DPD

Sumber Berita:

1. <http://jabartoday.com/ekonomi/2016/11/15/1400/25505/antisipasi-korupsi-gapensi-jabar-gandeng-sejumlah-lembaga#.WC0sTlxHYkx>
2. Harian Pikiran Rakyat , Konstruksi rawan Korupsi Gapensi Jawa Barat tingkatan Antisipasi Rabu 16 November 2016, 23 Hal;

Catatan :

1. Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Angka 1 Undang-Undang No 31 Tahun 1999)
2. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara (Pasal 1 Angka 4 UU No.28 Tahun 1999)
3. Penyelidikan adalah serangkaian tindak penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 5 KUHAP)
4. Lingkup pengaturan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, kegagalan bangunan, penyelesaian sengketa larangan persengkongkolan, dan sanksi administratif.(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 29 Tahun 2000)